

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL KULTURAL

Fara Amalia Lutfi Pratama
Universitas Slamet Riyadi

Email : faraamalialutfipratama@unisri.ac.id

Anita Trisiana
Universitas Slamet Riyadi
Email : anitatrissiana@unisri.ac.id

Retno Puji Astuti
Universitas Slamet Riyadi
Email : retnopujiastuti@unisri.ac.id

Lola Selvy Kurniawati
Universitas Slamet Riyadi
Email : lolaselvykurniawati@unisri.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan kepentingan bangsa dan negara, pendidikan penting untuk diadakan karena supaya mendapatkan keadilan, kebebasan, serta kesejahteraan rakyat. Pendidikan Kewarganegaraan itu tidak dari pengetahuan, serta keterampilan saja yang diajarkan di sekolah atau dikelas, tetapi juga harus diterapkan di kehidupan sebenarnya dengan cara ikut serta dalam kegiatan di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga mempunyai peran penting untuk mengajarkan penerus bangsa supaya menjadi masyarakat yang pintar, tetapi juga harus memahami akan hak serta kewajiban di kehidupan masyarakat dan negara. Pada artikel ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan mengenai landasan mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif sosial kultural. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Hasil penelitian dari artikel ini adalah sebagai berikut: 1) mengetahui peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap dan perilaku, rukun damai, toleransi terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2) mengetahui bagaimana secara sosiologis pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan moral yang menjelaskan tentang nilai karakter pada bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan penting dalam menumbuhkan sikap perilaku, toleransi, dan nilai patriotisme tidak harus melupakan kebhinnekaan yang dari dulu menjadi karakteristik negara Indonesia. Sosial kultural dapat diartikan sebagai

kebiasan atau gagasan- gagasan serta sebagai alat untuk memberi tanda pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosial kultural merupakan sistem yang mengatur perilaku manusia. Budaya sekolah cakupannya sangat luas seperti mencakup tentang kegiatan ekstrakurikuler, mengambil keputusan, interaksi sosial antar sesama di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: pendidikan kewarganegaraan, kemsyarakatan, sosial, kultural

Abstract

Education is in the interest of the nation and state, education is important to be held because it is for the sake of getting justice, freedom, and people's welfare. Citizenship education is not only based on knowledge and skills taught in school or in the classroom, but must also be applied in real life by participating in activities in the community. Citizenship education also has an important role in teaching the nation's successor to become a smart society, but also must understand the rights and obligations in the life of society and the state. This article aims to explain the foundation of civic education in a socio-cultural perspective. This research uses literature review method. The results of the research from this article are as follows: 1) knowing the important role of civic education in developing attitudes and behavior, harmonious peace, tolerance for others in the life of society, nation and state. 2) knowing how sociologically civic education is in the community. Education is a civic moral education which explains the character values of the Indonesian nation that are contained in Pancasila. Education has an important position in growing attitudes of behavior, tolerance, and the value of patriotism, not having to forget the diversity that has become a characteristic of the Indonesian state. Socio-culture can be defined as habits or ideas as well as a means of giving a sign to a certain group of people at a certain time. Socio-cultural is a system that regulates human behavior. The scope of school culture is very broad, including extracurricular activities, making decisions, and social interaction between people in the school environment.

Keywords: *community, socio, cultural, citizenship education*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai sosiokultural cukup beragam. Di setiap daerah terdapat beragam suku, adat istiadat yang memungkinkan banyak keberagaman yang dapat dinikmati. Keindahan alam serta banyaknya flora fauna yang tidak dapat diabaikan juga turut mendominasi keberagaman dalam negara ini. Interaksi sosial antar masyarakat tidak bisa dipisahkan dari ragam budaya, adat istiadat, serta

agama. Ragam budaya dinegara ini dapat mempererat integrasi sosial dan dapat juga menimbulkan disintegrasi sosial.

Di era globalisasi masyarakat dituntut agar setiap orang supaya dapat menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek, itu juga sebagai syarat untuk mendapat pengetahuan baru sehingga bisa menambah kompetensi diri kita. Tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu diciptakan pendidikan. Pendidikan merupakan kepentingan negara karena berperan penting bagi kesejahteraan negara serta individu. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian politik akan tetapi tidak bermaksud mendukung suatu politik apapun. Walau begitu ada konsekuensinya yakni sebagai pendidikan formal mempunyai tujuan dalam membimbing dan mendidik perilaku warga negaranya agar menjadi lebih baik, seperti mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran pendidikan tidak hanya untuk mengenalkan mata pelajaran biasa namun juga mengenalkan pada anak didik tentang berbagai macam kultur atau budaya yang ada didalam negara kita tercinta. Apabila generasi dini mempunyai wawasan yang luas tentang budaya sendiri maka akan terlindungi pula budaya itu. Dalam mempelajari suatu kebudayaan maka hakikatnya kita sudah menjaga kebudayaan itu.

Pada masa modern seperti saat ini setiap orang dituntut dapat menyesuaikan perubahan yang sangat maju ini sebagai satu-satunya syarat agar mendapat pengalaman yang modern dalam memperdalam kompetensi yang ada pada dirinya. Pemerintahan wajib menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi warga negaranya sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi disisi lain pembudayaan rezim sedang berkuasa. Pendidikan merupakan kepentingan negara, pendidikan penting untuk diadakan karena agar mendapatkan keadilan, kebebasan, kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan itu tidak diajarkan pengetahuan, serta keterampilan saja yang diajarkan di sekolah atau dikelas, tetapi juga harus diterapkan di kehidupan sebenarnya dengan cara ikut serta. Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan mengajarkan penerus bangsa supaya menjadi masyarakat yang pintar, tetapi juga harus sadar dalam hak serta kewajiban di kehidupan masyarakat dan bernegara. Menurut Sapriya (2015) mengatakan bahwa “ sebagai program pendidikan kewarganegaraan harus ditumbuhkan untuk pembimbingan warga negara yang terdapat di kehidupan masyarakat yang diluar lingkungan sekolah”. pendidikan kewarganegaraan sebagai sebagai sosial kultural telah berjalan di kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang mengkaji berbagai tulisan yang diperoleh dari buku, jurnal yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, sosial kultural maupun keberagaman masyarakat, buku atau jurnal nasional maupun internasional dengan modal analisis induktif

PEMBAHASAN

1. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap dan perilaku, rukun, damai, toleransi terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pusat pendidikan karakter dan nilai-nilai moral yang tercantum didalamnya, supaya dapat menciptakan, memajukan serta membimbing supaya menjadi warga negara yang baik serta cerdas. Harmanto menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting dalam menumbuhkembangkan pola pikir, sikap dan perilaku rukun, damai serta toleran tanpa meninggalkan semboyan bangsa Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan di zaman modern sekarang ,apabila mampu menjalankan dengan baik, maka dapat diartikan sebagai satu-satunya mata kuliah yang dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam membangun sebuah kebudayaan dalam Indonesia, pendidikan kewarganegaraan terfokus pada pembangunan karakter bangsa yang tujuannya demi mencapai tujuan nasional, sehingga tidak dapat dielakkan lagi bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah wajib bagi jenjang perguruan tinggi. Pembangunan karakter dalam suatu bangsa harus didukung dengan jenjang pendidikan yang mempunyai kualitas baik agar dapat tercapainya tujuan nasional bangsa. Pendidikan kewarganegaraan harus didukung dengan adanya metode belajar yang kreatif dan inovatif sehingga tidak akan terkesan membosankan.

Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun suatu warga negara yang baik harus mengembangkan tiga kompetensi yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civil skill), dan karakter kewarganegaraan (civic disposition). Syarat utama untuk menjadi warga negara yang baik harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan karakter berdasarkan Pancasila. Apabila ketiga kompetensi ini sudah dimiliki oleh setiap warga negara, jadi secara langsung ataupun tidak langsung yang akan menciptakan seorang yang kompeten, berkomitmen, dan memiliki kepercayaan diri.

Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik dengan baik dan maksimal, apabila pendidikan kewarganegaraan dalam implementasinya berdasar atas empat pilar, yaitu:

1. Learning to know (belajar untuk mengetahui), yaitu memperoleh instrumen-instrumen pengertian.
2. Learning to do (belajar untuk berbuat), yaitu mampu bertindak secara kreatif dilingkungannya.
3. Learning to live together, yakni berkedudukan serta bekerjasama dalam dengan orang lain dalam semua kegiatan yang positif.
4. Learning to be (belajar untuk menjadi seseorang), yaitu mampu mengembangkan kepribadiannya agar lebih benar serta bertindak secara otonomi, ketentuan, serta tanggung jawab yang tak terbatas.

Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan mampu mengimplementasikan empat pilar diatas namun banyak terjadi kendala yang menyebabkan tujuan pendidikan kewarganegaraan belum bisa tercapai dengan maksimal. Kendala yang selama ini dihadapi pendidikan kewarganegaraan yaitu pertama, penerapan metode belajar seorang guru berbeda-beda terutama pada daerah maju dan berkembang dari bangsa Indonesia misal Papua. Kedua, kualitas guru yang tidak memiliki 4 kompetensi (profesional, pedagogik, sosial, kepribadian) dan metode belajar yang digunakan sangat monoton sehingga cenderung membosankan. Apabila kendala-kendala diatas dapat diatasi dengan baik jadi pendidikan di Indonesia pasti bisa membangun Sumber Daya Manusia yang baik dan memiliki kualitas yang terjamin.

Bangsa Indonesia tidak akan dipandang setengah oleh bangsa lain, jika saat ini Indonesia hanya dikenal karena Sumber Daya Alam yang banyak tapi dengan adanya pendidikan lebih mementingkan kualitas dan kuantitas maka kan akan sebagai negara dengan peradaban yang baik, karena didukung oleh sumber daya manusia melalui jenjang pendidikan terutama pendidikan kewarganegaraan yang membentuk warga negara dengan karakter baik.

Budaya multikultural dalam menanamkan nilai-nilai patriotisme.

Peran pendidikan kewarganegaraan yakni membina warga negara Indonesia agar menjadi yang lebih baik. Selain itu juga menanamkan nilai-nilai patriotisme terhadap warga negara agar mencintai tanah air serta bangsa yang membela bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara majemuk baik dari segi agama, suku bangsa, golongan, maupun budaya lokal, perlu menyusun konsep pendidikan multikultural sehingga menjadi

pegangan untuk memperkuat identitas nasional. Dengan cara ini, diharapkan bahwa generasi muda bangsa Indonesia setidaknya memiliki identitas nasional, sehingga mereka tidak akan mudah terpecah belah dan mampu bersiang di era pasar bebas maupun globalisasi seperti saat ini.

Pendidikan multikultural juga dapat menanamkan nilai-nilai patriotisme kepada generasi muda bangsa Indonesia. Nilai-nilai patriotisme yang sekarang mulai memudar dengan adanya globalisasi yang masuk Indonesia yang mana sebenarnya masyarakatnya juga belum sepenuhnya siap untuk menerima beberapa hal yang akan memecah belah bangsa dengan adanya berbagai masalah yang memicu sara. Bangsa Indonesia yang majemuk membutuhkan pendidikan multikultural kepada semua warga negara untuk memperkenalkan berbagai budaya, agama, ras, suku dan antar golongan yang dimiliki oleh Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan sudah berupa untuk menanamkan sikap patriotisme kepada masyarakat, memang sesekali dalam pendidikan tidak optimal hingga menimbulkan kurangnya rasa cinta tanah air bangsa dan negara.

Budaya multikultural yang terdapat di Indonesia sangatlah beragam sehingga dapat mempengaruhi sikap patriotisme generasi muda yang bisa dibilang belum cukup siap untuk dipengaruhi oleh budaya luar yang masuk ke Indonesia melalui globalisasi, sehingga budaya dalam negeri atau budaya lokal kalah saing dengan budaya luar yang menjamur di Indonesia.

Kemerosotan nilai patriotisme salah satu contoh yang terjadi di Indonesia sehingga pendidikan kewarganegaraan serta budaya multikultural berperan penting dalam upaya menanamkan sikap patriotisme dalam kehidupan warga negara. Nilai-nilai patriotisme bagi warga negara harus ditanamkan sejak sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Teori sosiokultural muncul dari kesadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat kebudayaan dengan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat dimana keduanya membicarakan tataran yang sama yaitu nilai-nilai. Pemahaman terhadap hal ini sangat penting, supaya nilai yang tercantum dalam pendidikan bisa diajarkan sekaligus dipraktikkan didepan peserta didik. Sehingga diharapkan melalui peningkatan pendidikan multikultural ini siswa supaya lebih mudah mempelajari mata pelajaran serta mengembangkan kesadaran peserta didik supaya selalu berjiwa humanis, pluralis, dan demokratis. Pada akhirnya peserta didik diharapkan menjadi “generasi multikultural” di masa yang modern dalam menjumpai situasi di kehidupan masyarakat, negara, serta dunia yang sulit ditebak. Dengan demikian, mereka diperlukan memiliki kedisiplinan, kepedulian humanisme, menjunjung tinggi intergritas, jujur dalam bertingkah laku

dikehidupan sehari-hari, mempergunakan nilai demokrasi, keadilan, serta kemanusiaan.

Dibawahnya ada alasan mengapa pendidikan harus sesuai dengan nilai-nilai sosio-kultural:

1. Pentingnya menilai budaya dalam pendidikan ini karena dorongan yang muncul di dalam diri manusia sadar atau tidak merupakan akhir dari kebudayaan yang mana individu itu hidup. H.A.R Tilaar mengambil opini yang disampaikan oleh John Gillin perkembangan kepribadian manusia di dalam kebudayaan dipandang dari teori behaviorisme dan psikoanalitis¹
2. Kebudayaan dapat mengajukan keadaan yang harus disadari serta yang tidak disadari untuk belajar
3. Kebudayaan mengantarkan dengan cara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi-reaksi kelakuan tertentu.
4. Kebudayaan mempunyai sistem “reward and punishment”, dalam kelakuan tertentu. Pada setiap bagian kebudayaan akan memajukan setiap perilaku yang sepadan dengan strata nilai di dalam budaya tersebut dan sebaliknya memberikan hukuman terhadap kelakuan-kelakuan yang bertentangan atau mengusik ketentraman hidup suatu masyarakat budaya tertentu.
5. Kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk kelakuan tertentu melalui proses belajar.

Penyadaran kepada peserta didik bahwa negara Indonesia merupakan negara yang bermacam, multikultural, multi-etnik, multi-religi merupakan sebuah anugerah dan sangat berpengaruh dalam pendidikan di Tanah Air.

Hal ini akan memberikan pengalaman anak tentang bagaimana hidup bersama dengan orang/individu/kelompok yang berbeda. Ketika anak tidak terbiasa dengan heterogenitas budaya, ia cenderung tertutup dan lebih suka berinteraksi dengan sesama anggotanya saja. Generasi penerus ini dalam perkembangannya akan lebih suka paradigma eksklusif dan cenderung menolak perbedaan yang ada.

Pendidikan nilai-nilai sosio-kultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya

¹ Tilaar, H. (2002). Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.

yang hidup di tengah masyarakat yang beragam. Dengan pendidikan sosio-kultural, pendidikan tidak sekedar menanamkan kembali nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta berbangsa di era modern saat ini, tapi juga menyelidiki dalam menjelaskan kembali rasa kebangsaan itu sendiri dalam menghadapi perubahan berbagai konflik sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam era global. Dengan kata lain, diterapkannya pendidikan sosio-kultural ini, diharapkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan yang sebagian besar dipengaruhi dengan adanya perbedaan gaya hidup, contoh adanya perbedaan agama, ras, etnis, bahasa, gender, umur, serta kelas sosial-ekonomi dapat diminimalkan. Agar tujuan pendidikan sosio-kultural ini dapat diraih, maka harus dibutuhkan dengan adanya kedudukan serta dukungan dari guru/tenaga pengajar, institusi pendidikan, dan para pembuat kebijakan pendidikan lainnya, terutama dalam penerapan kurikulum dengan pendekatan multikultural.

2. Landasan filosofis pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup sosial kultural.

Manusia dan kebudayaan tak bisa di pisahkan, keduanya saling beriringan. Manusia di lahirkan untuk mengembangkan kebudayaan,; tiada kebudayaan tanpa manusia, begitu pula sebaliknya tiada manusia tanpa kebudayaan. Kebudayaan juga mempunyai khas sendiri sendiri tidak semuanya sama antar budaya masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Dan juga, faktanya dalam masyarakat ada beberapa sub sistem budaya yang membedakan, seperti sub-sistem budaya untuk kelompok sosial, kelompok regional, kelompok ekonomi.

Pendidikan yang dibutuhkan masyarakat ialah pendidikan yang diinstitusikan, disengaja serta disusun oleh masyarakat sendiri sesuai dengan adanya tambahan alternatif serta efektif dalam pendidikan formal dalam proses pembelajaran pengalaman untuk seumur hidup, dalam segala usia, waktu jangka pendek, serta menuju kedalam kualitas yang tidak terdapat di pendidikan formal.

Surakhmad memberikan 6 situasi yang bisa meyakinkan terciptanya rencana pendidikan berlandaskan masyarakat sebagai peninggalan nilai kebudayaan yakni:

1. Masyarakat sendiri memiliki kepedulian dan kepekaan mengenai pendidikan.
2. Masyarakat sendiri telah menyadari pentingnya pendidikan bagi kemajuan masyarakat.
3. Masyarakat sendiri telah merasa memiliki pendidikan sebagai potensi kemajuan mereka.

4. Masyarakat sendiri telah mampu menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang bermakna bagi mereka.
5. Masyarakat individu sudah aktif di dalam penyelenggaraan pendidikan.
6. Masyarakat individu yang menjadi pengikut pendanaan dan pengadaan.²

Pendidikan non formal terkadang hanya diberikan pada orang yang dewasa. Pendidikan untuk orang dewasa itu ada 2 yaitu formal dan non formal dimanapun lokasi ia berada. Oleh sebab itu pendidikan non formal itu juga sangat penting untuk membangun sikap seseorang.

Sebagian besar pengolongan warga negara yang aktif digunakan untuk modal bagi active citizenship tersebut pada level lokal, nasional dan global. Di tingkat lokal untuk menunjuk pada warga negara yang ikutan aktif dalam kehidupan mereka; mengatasi masalah, memberikan perubahan ataupun menolak perubahan yang tidak diinginkan. Sedangkan pada level global/internasional, warga negara yang aktif secara global dapat dilibatkan dalam gerakan untuk memberikan informasi tentang kelestarian lingkungan atau perdagangan yang adil, supaya mengurangi kemiskinan atau supaya menghilangkan perdagangan orang serta perbudakan. Warga negara yang aktif tidaklah warga negara yang baik karena mereka mungkin tidak mematuhi aturan maupun bertingkah laku sesuai cara tertentu. Seringkali, banyak warga negara yang melanggar norma yang ada, walaupun pada umumnya pasti ada di dalam perbatasan demokrasi serta tidak terlibat di dalam perlakuan kekerasan. Warga negara banyak yang menyatukan berbagai nilai yang terkandung dalam kewarganegaraan demokratis yang aktif termasuk menghormati keadilan, demokrasi dan supremasi hukum; keterbukaan; toleransi; keberanian untuk mempertahankan sudut pandang serta kesiapan dalam menangkap, bekerja serta membela orang lain.

Kewarganegaraan membentuk active democratic citizenship yakni harus dipusatkan dalam 3 dimensi utama. Dimensi yang pertama yang berisi subkategori yakni politik, sosial, budaya, ekonomi serta bentuk keikutsertaan. Dimensi yang kedua menangkap daerah berhasil yang terdiri dari subkategori yaitu nilai, sikap, dan disposisi. Keterampilan dimensi

² Tilaar, H. (2002). Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.

terakhir ada 2 subkategori yakni keterampilan umum dan keterampilan ikut serta.

Warga negara yang baik setidaknya tercermin dari tiga aspek utama. Ketiga aspek itu meliputi:

- 1) Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge);
- 2) kecakapan kewarganegaraan (civic skills); dan
- 3) watak-watak kewarganegaraan (civic dispositions).

Sehingga satu-satunya syarat warga negara yang baik adalah bersikap demokratis. Mengenai hal tersebut, De Groot mengelaborasi lima prasyarat untuk terbentuknya sikap demokratis warga negara, yaitu:

- (1) elaborasi analisis terhadap pemahaman akan nilai demokrasi serta keberagaman;
- (2) kapasitas (efikasi internal dan eksternal);
- (3) hubungan-hubungan aktif (komitmen serta koneksi);
- (4) Kemauan transformasi (bersifat terbuka terhadap kritik); dan
- (5) kemampuan berdialog (empati dan kompetensi dialogis).

Dalam Kelima sikap positif tersebut sebenarnya sudah diwujudkan ke dalam kebudayaan masyarakat Indonesia hanya tidak secara tegas dinyatakan bahwa sikap tersebut adalah sikap positif terhadap demokrasi. Tahapan pembentukan warga negara yang baik ternyata tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang bersifat top down (dari Pemerintah Pusat), tetapi harus bersifat bottom up (dari bawah-akar rumput).

Pendidikan nonon-forma ialah proses memanusiakan manusia untuk meningkatkan kualitas berpikir, moral dan mental sehingga mampu memahami, mengungkapkan, membebaskan. Serta menyesuaikan dirinya terhadap realitas yang meliputi. Pendidikan nonformal dalam pendidikan untuk orang dewasa menekankan pada pembelajaran mandiri yang berbeda dengan pendidikan bagi anak-anak. Perbedaan antara pendidikan untuk anak-anak dan orang dewasa adalah mengacu pada upaya yang bertujuan dalam mendukung pembelajaran oleh banyak orang yang sudah menjadi tanggung jawab dalam kehidupan mereka sendiri, oleh sebab itu, seutuhnya kompeten untuk menjalankan masa depan individu sendiri, termasuk ketentuan yang standar tentang belajar “jika, apa, kapan dan bagaimana”

3. Landasan sosiologis pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sosial kultural

Sebenarnya pendidikan kewarganegaraan sering terjadi di kehidupan diantara kehidupan masyarakat terdapat harapan yang pada akhirnya pendidikan kewarganegaraan harus dibutuhkan oleh bangsa di dalam kehidupan bernegara. Metode menerapkan pendidikan pada masyarakat adalah suatu cara yang sebenarnya berjalan sesuai alur kehidupan berorganisasi untuk masyarakat maju. Bagian dari suatu organisasi mempunyai hak serta kewajiban walaupun dalam suatu organisasi tersebut. Negara merupakan suatu organisasi yang mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi hingga sering diucap sebagai organisasi tertinggi. Sudah pasti masalah hak serta kewajiban kelompoknya yang disebut masyarakat, yang dimana dia berada harus mendapatkan pendidikan sesuai dengan tugas dan perannya.

Percobaan main hakim secara individu, pemerasan, pemerkosaan, perampasan, serta banyak kasus kriminal lain di lingkungan masyarakat yang sering terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari. Percobaan lingkungan itu banyak bertimbun bila tak ada pengelolaan secara tepat dari cara pendidikan. Rintangan yang harus dilawan tidak hanya berbentuk konflik tetapi akan tetapi yang telah mencapai pada tingkatan tumpukan masalah yang multidimensional. Semua kenyataan ini menunjukkan adanya korelasi dengan lemahnya proses pendidikan kewarganegaraan dalam domain program sosial kultural meskipun disadari pula bahwa munculnya permasalahan yang sudah multidimensional tersebut bukanlah permasalahan yang menjadi kapasitas pendidikan kewarganegaraan saja. Sebab masalah yang telah berada pada semua lapisan masyarakat dari mulai kelas bawah hingga kelas atas, jadi pendidikan kewarganegaraan harus dikonsep secara komprehensif, mencakup semua lapisan melalui berbagai program, melibatkan berbagai lembaga pemerintah atau swasta, LSM serta diadakan dengan cara operasi gabungan dan berkesinambungan.

Demokrasi Pendidikan, dapat diwujudkan diantaranya melewati pelaksanaan rancangan pendidikan kewarganegaraan mengarah pada masyarakat dalam suatu pelaksanaan Pendidikan Nasional. Pendidikan kewarganegaraan mengarah pada masyarakat adalah Pendidikan disusun, dilakukan, dinilai serta ditingkatkan pada warga negara menuju ke cara merespon rintangan serta kesempatan yang berada pada kehidupan masyarakat sendiri secara mengarah ke era modern. Dari makna lain, pendidikan kewarganegaraan mengarah di masyarakat merupakan rancangan Pendidikan “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”.

Konteks sosio-kultural Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan disebut dengan civic education dan citizenship education, dari dua arti tersebut merupakan rencana edukasi yang mempunyai satu tujuan yaitu meningkatkan pemahaman karakteristik serta keterampilan supaya menjadi masyarakat yang baik, melewati pemahaman belajar yang sudah dipilih. Dari civic education dan citizenship education juga memiliki arti yang tidak sama, menurut Cogan dan Derricot (1998) mencoba menjelaskan secara detail tentang makna dari civic education versus citizenship education. Civic Education diterapkan disalah satu mata pelajaran yang ada di sekolah yang direncanakan dalam menyiapkan generasi penerus supaya dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, suatu saat sesudah mereka menginjak remaja. Citizenship education dilihat umum yang merangkum pengetahuan baik di dalam sekolah maupun luar sekolah, contohnya yang terjadi pada lingkungan keluarga, pada organisasi kemasyarakatan, serta melalui media. Maka dari itu Cogan mempertegas bahwa “pendidikan untuk kewarganegaraan adalah konsep menyeluruh yang lebih besar di sini sementara pendidikan kewarganegaraan hanyalah satu bagian, meskipun merupakan bagian yang sangat penting, dari perkembangan seseorang sebagai warga negara.”

Pada isi lain, tinjauan pendidikan kewarganegaraan ada yang menjadikan satu mata pelajaran khusus. Tetapi ada pula yang mencampurkan mata pelajaran lain. Pendidikan kewarganegaraan disebut mata pelajaran khusus sering kita temui di Indonesia. Hal ini menjadi common sense dari teoretisasi pendidikan kewarganegaraan di dunia, yaitu mulai dipublikasikan dengan arti lain paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Ciri yang paling menonjol dari pendidikan kewarganegaraan “paradigma baru”, yang memuat tinjauan tentang hak-hak dan tanggung jawab dari warga negara; pemerintah dan lembaga-lembaga negara; sejarah dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum serta prinsip hukum, hak asasi manusia, politik, ekonomi serta sosial, proses demokratis, ikut serta aktif warga negara dalam masalah kewargaan; perspektif internasional; dan nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.

Demokrasi dalam pendidikan adalah suatu kewajiban, supaya dapat mengembangkan manusia-manusia yang berwatak demokratis. Pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya berhubungan dengan pembaruan pendidikan serta adanya paradigma pendidikan dari pusat ke daerah, dari percobaan pendidikan otoriter ke percobaan pendidikan demokratis yang membebaskan, serta dari rencana pendidikan pemerintah ke rencana pendidikan masyarakat. Menurut Undang-Undang SISDIKNAS 2003 pada pasal 55 menyatakan bahwa “penyelenggaraan pendidikan berdasarkan masyarakat harus tetap mengikuti kurikulum dan pendanaan pendidikan

yang disamakan dengan standar nasional pendidikan”. Padahal pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pendidikan berdasarkan masyarakat sebagai hak masyarakat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Maka terjadi keraguan pemerintah untuk tujuan dalam memihak masyarakat, sehingga peraturan yang dikeluarkan bersifat paradoks, antara memilih kepentingan masyarakat atau memilih kepentingan kekuasaan. Pendidikan pada dasarnya merupakan pencerminan kondisi negara dan kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa. Pendidikan dengan sendirinya adalah pemikiran dari pengelola yang ada. Konflik pendidikan akan menjadi konflik politik jika pemerintah ikut terlibat didalamnya.

Tugas pertama pendidikan yaitu adalah membuat tempat untuk berpikir analitis terhadap ketidakadilan, dan advokasi menuju strata sosial yang adil oleh karena itu pendidikan tidak bisa jauh dari masyarakat yang termasuk. Pendidikan kritis yaitu melakukan kritik terhadap sistem dominan untuk memihakkan rakyat miskin serta rakyat yang terinjak dalam membuat strata sosial baru yang adil.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan moral yang menjelaskan tentang nilai- nilai karakteristik bagi bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan penting dalam menumbuhkan sikap perilaku, toleransi, dan nilai patriotisme tanpa harus melupakan sikap kebhinekaan yang dari dulu menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Sosial kultural dapat diartikan sebagai kebiasaan atau gagasan-gagasan serta sebagai alat untuk memberi tanda pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosial kultural merupakan sistem yang mengatur perilaku manusia. Budaya sekolah cakupannya sangat luas seperti mencakup tentang kegiatan ekstrakurikuler, mengambil keputusan, interaksi sosial antar sesama di lingkungan sekolah.

Pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang digolongkan, yang sudah direncanakan oleh masyarakat dengan ciri-ciri ada gabungan, pelengkap untuk pendidikan didalam sekolah untuk melakukan pengajaran selamanya, mulai dari umur, durasi waktu yang singkat, serta menunjuk pada kualitas yang tidak diajarkan di pendidikan dalam sekolah.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif sosial kultural sudah berjalan didalam lingkungan warga negara. Akan tetapi dalam pelaksanaan Perspektif sosial kultural itu mempunyai 2 bentuk program sosial kultural yaitu direncanakan sebagai program pendidikan sehingga mengakibatkan efek pengetahuan serta yang tidak direncanakan yang akhirnya digolongkan sebagai efek pendamping dari suatu aktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Engle, S. H. & Ochoa, A. (1988). *Education for democratic citizenship: decision making in the social studies*. New York: Teachers College Press, Teachers College. Columbia University.
- Komaalasari, K. (2008). *Pengaruh pembelajaran kontekstual dalam PKn terhadap kompetensi kewarganegaraan siswa SMP*. Bandung: Univeristas Pendidikan Indonesia.
- Mahfud, Choirul. (2010). *Pendidikan multicultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustadi, Ali 2011. *Pendidikan Karakter Berwawasan Sosial kultural(Sociocultural Based Character Esucation) di Sekolahn Dasar, Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY)*.
- Parker, W. & Jerolimek, J. (1984). *Citizenship and the critical role of the social studies*. Washington DC: NCSS
- Samsuri. (2006). *Pembentukan Warga Negara Demokratis dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia*. *Cakrawala Pendidikan*, 30(2): 28.
- Samsuri. (2011). *Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia*. *Cakrawala Pendidikan*, 30 (2): 28
- Stavenhagen, Rudolfo. (1996). *Education for a Multikulturl Word, in Jasque Delors (et all), Learning: The Trasure Within*. Paris: UNESCO
- Suharto, T. (2005). *Konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat*. *Cakrawala Pendidikan*, XXIV(3),323-346.
- Syahri. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Malang: UMM Press.
- Tilaar, H. (2002). *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Inndonesia. Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Trisiana,A, Sutikno, A , Etc, 2020 Digital Media Based Character Education Model As A Learning Innovation in The Midst Of A Corona Pandemic. *Webology*. Vol: 17(2).Pp.103-117.
- Trisiana,A. 2015, *The Development Strategy of Citizenship Education in Civic Education Using the Project Citizen Model in Indonesia*, *Journal of Psychological anda Educatioanal Research (JPER)*,23(2), PP.111-124.
- Winataputra, U. S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegraan sebagai Pendidikan Demokrasi*. *Disertasi*.Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.